

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang masalah**

Turki adalah sebuah negara yang terletak diantara dua benua yaitu Asia dan Eropa. Bangsa Turki diperkirakan berasal dari Asia tengah.<sup>1</sup> Di Turki bagian utara berbatasan dengan beberapa negara-negara Eropa yaitu Ukraina, Rusia, Yunani dan Bulgaria; Sedangkan dibagian selatan berbatasan dengan Iraq, Suriah dan beberapa negara timur tengah lainnya. Turki jumlah memiliki penduduk kurang lebih 81 juta jiwa pada Februari 2018 dengan 99,8% jumlah penduduk Turki beragama Islam dan selebihnya merupakan penganut agama Kristen dan Yahudi.<sup>2</sup>

Pada Juli 2018 Turki mengalami transisi sistem pemerintahan yang sebelumnya menganut sistem pemerintahan parlementer berubah menjadi sistem pemerintahan presidensial. Perubahan besar dalam sistem pemerintahan Turki dimulai dari adanya upaya kudeta oleh militer Turki pada tahun 2016 sehingga Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menetapkan status darurat negara. Pada tahun 2017, Turki mengadakan referendum konstitusional dimana mayoritas masyarakat Turki

---

<sup>1</sup> Sidik Jatmika. Hubungan Internasional Kawasan Timur Tengah (Yogyakarta: Samudra Biru,2016), hal.172

<sup>2</sup> Konsulat Jendral Republik Indonesia Istanbul, "Profil Negara Turki", diakses dari <https://ex.kemlu.go.id/Istanbul/id/Pages/Turki.aspx> pada 10 September 2019.

memilih sistem pemerintahan presidensial menjadi konstitusional baru.<sup>3</sup>

Turki dan Suriah merupakan negara yang saling berdekatan secara geografis. Selain itu kedua negara ini memiliki berbagai kesamaan dalam segi budaya, ekonomi dan politik. Berbagai kesamaan tersebut dapat dimaklumi bahwasanya dahulu Suriah juga merupakan negara yang berada dibawah naungan Kesultanan Utsmaniyah yang berabad-abad menjadi kerajaan yang kokoh di Timur tengah. Setelah Perang Dunia I berakhir sebagian wilayah Suriah diberikan kepada Prancis oleh Liga Bangsa-Bangsa yang dikenal dengan istilah *Mandat Prancis* (1923-1946) kemudian pada 17 April 1946 Suriah mendapatkan kemerdekaan sebagai negara Republik yang berdaulat.<sup>4 5</sup> Sementara Turki merupakan negara yang berdiri pada 23 Oktober 1923 setelah runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah setelah Perang Dunia I, Turki didirikan oleh Presiden pertama Turki dan salah satu orang paling berpengaruh dalam sejarah Turki ialah Mustafa Kemal Ataturk.

Mustafa Kemal Ataturk memiliki konsep dalam membangun negara Turki yang dikenal dengan istilah Kemalisme, Kemalisme adalah ide-ide dan prinsip-prinsip realistik tentang negara, ideologi, ekonomi dan lembaga fundamental masyarakat yang menjamin kemerdekaan penuh, perdamaian dan kesejahteraan Bangsa Turki. Prinsip utama

---

<sup>3</sup> Republika, "Usai Pelantikan Erdogan, Turki Terapkan Sistem Pemerintahan Baru", diakses dari <https://dunia.tempo.co/read/1103628/usai-pelantikan-erdogan-turki-terapkan-sistem-pemerintahan-baru> pada 10 September 2019

<sup>4</sup> Denys P. Effec, "The Mandate System of the League of Nations". Jurnal ilmu politik dan ilmu sosial Vol. 96, juli 1921, hal 74-77, [https://www.jstor.org/stable/1014872?seq=1#metadata\\_info\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/1014872?seq=1#metadata_info_tab_contents) . 12 September 2019

<sup>5</sup> Mandat merupakan sistem yang memberikan wewenang pada sebuah negara untuk bertindak sebagai wali amanat kepada negara lain sampai negara tersebut mampu untuk merdeka.

Kemalisme adalah republikanisme, nasionalisme, populisme, etatisme, sekularisme dan revolusi. Pemikiran Kemalisme hingga pada saat ini masih dipegang teguh oleh sebagian politisi dan sebagian rakyat Turki.<sup>6</sup>

Pada era 2000-an Turki dan Suriah mulai membangun hubungan baik dimulai dengan kunjungan Presiden Suriah Bashar Al Assad ke Ankara pada Januari 2004, dan yang membuat hal tersebut menjadi istimewa ialah Bashar Al Assad merupakan Presiden Suriah pertama yang berkunjung ke Turki. Pada pertemuan tersebut Turki dan Suriah menandatangani dua perjanjian ekonomi yang bertujuan untuk mengembangkan perdagangan, pariwisata, dan investasi antara kedua negara. Pada Desember 2004 hubungan kedua negara semakin membaik ketika Perdana Menteri Turki pada saat itu Recep Tayyip Erdogan berkunjung ke Damaskus untuk menandatangani perjanjian perdagangan bebas antara kedua negara tersebut.

Kedua pertemuan tersebut merupakan sesuatu yang sangat positif bagi kedua negara, mengingat hubungan Turki dan Suriah pada era 1990-an cenderung bersitegang karena perbedaan sikap terhadap PKK (*Partiya Karkerên Kurdistanê*) atau yang dikenal sebagai Partai pekerja Kurdistan ini ingin mendirikan negara merdeka di wilayah Turki bagian tenggara.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Oxford Islamic Studies Online, "Kemalism", diakses dari <http://www.oxfordislamicstudies.com/print/opr/t236/e0440> pada 13 September 2019

<sup>7</sup> Andina Sari Handayani dan Saiful Bachri, "UPAYA PEMERINTAH TURKI DALAM MENGATASI GERAKAN SEPARATISME SUKU KURDI TAHUN 1984-2007:", Jurnal ilmu politik dan ilmu sosial, Desember 2012, hal 10, <https://www.neliti.com/id/publications/241916/upaya-pemerintah-turki-dalam-mengatasi-gerakan-separatisme-suku-kurdi-tahun-1984>, pada 13 September 2019

Pada Maret 2011 meletus krisis dalam negeri Suriah, krisis tersebut diawali dengan 15 pelajar yang menulis slogan slogan anti-pemerintahan Bashar Al Assad di beberapa tembok di Kota Daraa. *Arab Spring* yang terjadi di beberapa negara Timur tengah seperti krisis di Mesir yang mengakibatkan jatuhnya Presiden Hosni Mubarak dan krisis di Tunisia yang menyebabkan Presiden Zainal Abidin turun dari jabatannya menjadi inspirasi bagi para remaja ini untuk melakukan tindakan tersebut.<sup>8</sup> Setelah melakukan aksi tersebut 15 remaja yang menulis slogan slogan anti pemerintahan Suriah ditangkap dan kemudian dipenjara oleh Jendral Atef Najib yang merupakan sepupu Presiden Bashar Al Assad. Akibat penangkapan 15 remaja tersebut menyulut emosi masyarakat Suriah dan menyebabkan protes besar-besaran menuntut pembebasan para remaja tersebut.

Tidak kunjung menanggapi tuntutan untuk membebaskan para remaja yang ditahan, reaksi militer Suriah melakukan hal sebaliknya, mereka menembaki para demonstran yang menyebabkan tewasnya 4 rakyat Suriah. Teror yang dilakukan oleh militer Suriah itu tidak meredakan situasi, sebaliknya respon rakyat Suriah semakin meluas dari Daraa menuju kota-kota Homs, Hama, Ar Rasta, Deir es Zor di Suriah Timur hingga ke pinggir Latakia dan Banyas di Pantai Mediterania atau laut Tengah. Demonstrasi ini kemudian semakin membesar dan situasi semakin memburuk yang mengakibatkan perang sipil. Perang sipil ini semakin membesar ketika isu yang berkembang mengatakan perang yang terjadi di Suriah merupakan perang antara Mazhab Syiah dan Sunni, Presiden Basshar Al Assad dianggap sebagai sosok seorang Syiah

---

<sup>8</sup> Arab Spring adalah gelombang revolusi dan protes yang terjadi diberbagai negara Arab

sementara perlawanan yang terjadi pada saat itu diwakili oleh mazhab Sunni.<sup>9</sup>

Pada 25 Maret 2011, protes dan demonstrasi yang didukung oleh pihak oposisi semakin mengumuka di seluruh kota-kota di Suriah, mereka memberikan tuntutan kepada Presiden Bashar Al Assad yaitu; mundur sebagai presiden Suriah, reformasi, dibukanya kebebasan berpolitik dan mendirikan partai politik, perbaikan ekonomi dan kebebasan untuk berpendapat. Sebagai jawaban dari tuntutan tersebut pada 29 Maret 2011 beberapa elit pemerintah Suriah mengumumkan pengunduran diri dari kabinet, hal ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan reformasi yang ditujukan oleh para demonstran.<sup>10</sup>

Keesokan harinya tepat pada 30 Maret 2011, Presiden Bashar Al Assad menyampaikan pidato untuk meredam situasi yang memanas di Suriah didepan dewan legelstatif. Dalam pidato tersebut Presiden Basshar Al Assad mengabulkan beberapa tuntutan untuk reformasi dan akan melakukan tuntutan demonstrasi secara bertahap, namun ia menolak untuk mundur dari jabatannya.<sup>11</sup> Uni Eropa (EU) menjatuhkan sanksi berupa pelarangan perjalanan dan pembekuan aset kepada sejumlah pejabat Suriah yang dianggap bertanggungjawab dalam penanganan demonstrasi. Setelah peristiwa penembakan kepada demonstrasi di berbagai kota di Suriah yang mengakibatkan 200 orang tewas pada 8 April 2011.

Selain itu, Uni Eropa juga menerapkan embargo senjata kepada Suriah untuk mengurangi tindakan represif

---

<sup>9</sup> A.Muchaddam Fahham dan A.M. Kartaatmaja, "KONFLIK SURIAH: AKAR MASALAH DAN DAMPAKNYA", Jurnal ilmu politik dan ilmu sosial, vol. 5, Juni 2014, hal. 37-38, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/332/266> , pada 14 September 2019

<sup>10</sup> Ibid., hal 40

<sup>11</sup> Ibid., hal 41

pemerintah dan militer Suriah. Melihat situasi di negara Suriah semakin memburuk Recep Tayyip Erdogan selaku Perdana Menteri Turki pada saat itu, mengutuk penggunaan kekerasan terhadap warga sipil. Pada bulan Mei 2011, Turki memberikan dukungan untuk pihak demonstran dengan mempersilahkan anggota oposisi Suriah untuk melakukan konferensi di Antalya.<sup>12</sup>

Pada awal 2012 oposisi menganggap bahwa Dewan Nasional Suriah (*Al-Majlis al-Waṭanī as-Sūri*) yang didirikan pada Agustus 2011 sebagai front untuk menjatuhkan Bashar Al Assad yang berbasis di Istanbul, Turki, masih terlalu lemah untuk mewakili gerakan oposisi. Akhirnya pada bulan November 2012, pemimpin oposisi Suriah mengumumkan pembentukan koalisi baru yang Koalisi Nasional untuk Revolusi Suriah dan Kekuatan Militer Oposisi Koalisi Nasional Suriah (*Etilaf*). Dalam satu bulan koalisi mendapat pangakuan dari berbagai negara yaitu; Qatar, Saudi Arabia, Yaman, Prancis, Turki, Italia, Spanyol, Britania Raya, Denmark, Norwegia, Belanda, Jerman, Belgia, Luxemburg, Australia, Amerika Serikat, Malta, Uni Eropa dan Liga Arab sebagai wakil sah rakyat Suriah. Dalam satu bulan berikutnya, sejumlah negara mengakui Koalisi Nasional Suriah sebagai pihak yang secara efektif dapat mewakili kelompok oposisi.<sup>13</sup>

Pada Desember 2012, Upaya Turki, Qatar dan Arab Saudi semakin terlihat, Ketiga negara tersebut mendanai dan mempersenjatai pihak pemberontak untuk melakukan perlawanan, sementara Iran dan kelompok militan Hizbullah dari Libanon melakukan hal serupa kepada pemerintah Suriah untuk memperkuat posisi militer Suriah. Keterlibatan Hizbullah

---

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Global Security, "National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Forces", diakses dari <https://www.globalsecurity.org/military/world/para/syrian-national-coalition.htm>, pada 15 Oktober 2019

dari Libanon dan Iran menjadi babak baru yang memungkinkan penggunaan aksi militer internasional di wilayah Suriah. Isu penggunaan senjata kimia semakin memperparah konflik dan kemudian menggundang reaksi Internasional. Penggunaan senjata kimia oleh militer Suriah diklaim berada di pinggiran kota Damaskus oleh militer Bashar Al Assad yang menewaskan ratusan orang pada 21 Agustus 2013.

PBB (*Perserikatan Bangsa-Bangsa*) mengerimkan utusan ke Suriah dan menemukan bukti senjata kimia di beberapa lokasi di Suriah. Amerika Serikat, Prancis dan Inggris mengecam penggunaan senjata kimia oleh rezim Bashar Al Assad dan berencana untuk melakukan aksi militer untuk melawan tindakan Bashar al Assad. Kecaman tersebut langsung di respon oleh Presiden Bashar Al Assad yang juga menyatakan untuk melawan agresi Barat. Namun kemungkinan aksi militer internasional akan sedikit berkurang setelah jalur diplomasi semakin gencar dilakukan oleh berbagai pihak yang menghasilkan kesepakatan antara Rusia, Suriah dan Amerika Serikat pada tanggal 14 September 2014 untuk menempatkan semua senjata kimia yang dimiliki Suriah dibawah kontrol internasional.<sup>14</sup>

Pada April 2014 Hampir sekitar 6,5 juta warga Suriah meninggalkan rumahnya akibat konflik berkepanjangan. Pada akhir tahun 2014, jumlah pengungsi Suriah diperkirakan akan mencapai 4,1 juta jiwa. Sejak September 2013, UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) telah menetapkan sedikitnya 2 juta warga Suriah sebagai pengungsi di empat negara tetangganya, yaitu Turki, Yordania, Irak dan Libanon. Sementara itu sekitar ratusan ribu warga Suriah mengungsi tanpa akses bantuan internasional. Dampak konflik Suriah sudah mencapai tahap yang semakin mengkhawatirkan, bukan saja bagi warga Suriah yang terpaksa mengungsi, tetapi juga telah menimbulkan permasalahan tersendiri di negara-negara tetangganya. Seperti Turki yang harus membuat 21

---

<sup>14</sup> Fahham dan Kartaatmaja, op.cit., 43.

kamp pengungsian di bawah wewenang AFAD (*Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı*).<sup>15</sup> AFAD adalah lembaga pemerintahan Turki dalam mengatasi mitigasi bencana, kesiapsiagaan menanggulangi masalah pengungsian dan keadaan darurat lainnya.<sup>16</sup>

Situasi di wilayah Suriah Utara masih belum stabil hingga tahun 2014, terlebih kehadiran YPG (*Yekîneyên Parastina Gel*) organisasi militer kurdi mengklaim kehadirannya untuk melindungi masyarakat Kurdi di Suriah dari serangan ISIS (*Islamic State in Iraq and Syria*). YPG merupakan aliansi milisi Pasukan Demokratik Suriah yang dikenal sebagai QSD (*Quwwāt Sūriyā al-Dīmuqrātīya*) yang sama-sama memerangin pemerintahan Bashar Al Assad. Recep Tayyip Erdogan menuding bahwa YPG merupakan bagian dari PKK (partai pekerja Kurdistan) yang bertujuan mendirikan negara di Turki tenggara. Kehadiran YPG diberbagai wilayah Suriah Utara menjadi ancaman serius bagi Turki.<sup>17</sup> Oleh sebab itu, untuk melindungi keamanan nasional Turki dari berbagai ancaman tersebut, Turki bergabung dengan Amerika Serikat untuk mendirikan zona aman di wilayah Suriah Utara.

## **B. Rumusan Masalah**

Bedasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis menarik rumusan masalah ***mengapa Turki membentuk zona aman di wilayah Suriah Utara?***

---

<sup>15</sup> Op.cit.,

<sup>16</sup> AFAD, "About Us", diakses dari <https://www.afad.gov.tr/en/2572/About-Us> pada 19 Oktober 2019

<sup>17</sup> Kompas, "Tanggapi Permohonan Bantuan Kurdi, Pasukan Suriah Masuk Kota Manbij", diakses dari <https://internasional.kompas.com/read/2018/12/28/18445071/tanggapi-permohonan-bantuan-kurdi-pasukan-suriah-masuk-kota-manbij> pada 14 September 2019.

## C. Landasan Teoritik

Sebagai pedoman untuk mempermudah penulis dalam melakukan analisis dan penelitian serta mencegah terjadinya penyimpangan pembahasan objek penelitian dan meluasnya pembahasan kearah yang tidak signifikan, maka penulis mencoba mengajukan landasan teoritik sebagai acuan dalam penelitian ini. Landasan teori merupakan teori dan pendapat para ahli yang tentunya berkorelasi dengan objek yang diteliti serta dapat memberikan dasar pemikiran yang kuat dalam suatu penelitian hingga di akui kebenarannya dalam mendukung suatu hipotesis.

### 1. Teori Kebijakan Politik Luar negeri

Politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional. Suatu komitmen yang pada dasarnya merupakan strategi dasar untuk mencapai suatu tujuan baik dalam konteks dalam negeri dan luar negeri serta sekaligus menentukan keterlibatan suatu negara di dalam isu-isu internasional atau lingkungan sekitarnya.<sup>18</sup> Secara umum politik luar negeri adalah strategi sebuah negara terhadap negara lain berdasarkan sikap dan tujuan untuk kepentingan nasional negara tersebut dalam keterlibatan di dunia internasional.

Menurut William D.Coplin, teori pengambilan keputusan luar negeri, yaitu: Jika seseorang ingin menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara, maka seseorang tersebut harus mempertanyakan para pemimpin negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Sebuah kesalahan besar jika menganggap

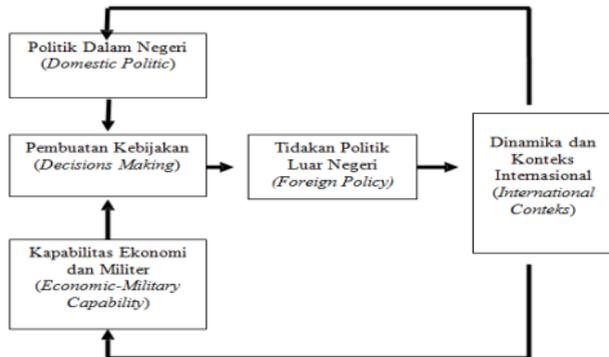
---

<sup>18</sup> Yanyan Mochamad Yani, "Politik Luar Negeri", Jurnal ilmu politik dan ilmu sosial, Juli 2010, hal.1, [http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/politik\\_luar\\_negeri.pdf](http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/politik_luar_negeri.pdf) diakses pada 16 September 2019

bahwa para pemimpin negara (para pembuat kebijakan luar negeri) bertindak tanpa pertimbangan. Tetapi sebaliknya, tindakan politik luar negeri tersebut dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil kebijakan luar negeri :

- a. Kondisi politik dalam negeri yang meliputi keadaan atau situasi di dalam negeri yang akan membuat keputusan, yaitu situasi politik di dalam negeri itu yang berkaitan dengan keputusan tersebut.
- b. Situasi ekonomi dan militer di negara tersebut, termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan dan keamanan.
- c. Konteks internasional (situasi di negara yang menjadi tujuan politik luar negeri), serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.<sup>19</sup>

Table I: Contoh Teori



<sup>19</sup> Teori Pembuatan Kebijakan Luar negeri yang diungkapkan Wilian D, Coplin, Introduction to International Politics : A Theoretical Overviews, terjemahan Marbun, CV. Sinar Baru, Bandung, 1992, hal.30.

Aplikasi variable Wiliam de Coplin, "Introductions to  
International

Politic : Teoritical Overview", dalam Yusuf Sufri,  
Hubungan Internasional : Telaah dan Teoritis

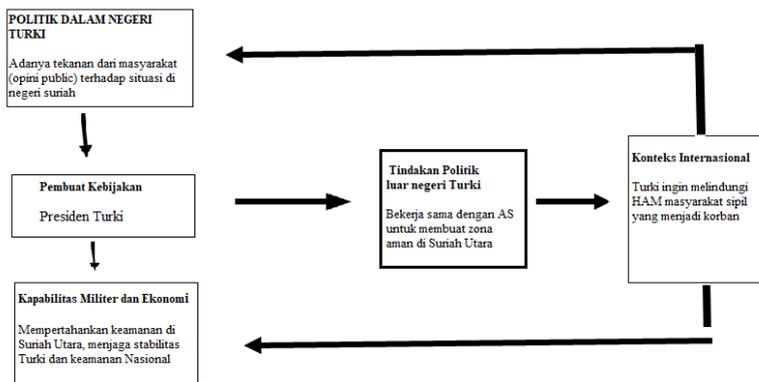
Dari Gambar diatas dapat dilihat bagaimana sebuah keputusan luar negeri dipengaruhi oleh berbagai kondisi dalam negeri (politik, ekonomi dan militer) dan Konteks internasional, akan tetapi pengambil keputusan luar negeri dimana dalam konteks ini Presiden sebagai penganban tugas dan bisa juga disebut sebagai aktor individu dan aktor rasional, dimana dalam model ini politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional. Penghitungan secara rasional, untung-rugi dalam politik dalam negeri, pengambilan keputusan, kondisi ekonomi dan militer sebagai tindakan politik luar negeri sementara konteks Internasional suatu produk tindakan politik suatu negara di masalalu, kini dan mendatang.

Dari gambaran teori tersebut dapat dilihat bahwa konteks internasional itu mempengaruhi sifat atau perilaku yang diambil dari sebuah negara. Dari banyak penjelasan tentang mengapa negara berperilaku seperti yang dilakukannya, tidak ada yang lebih sering diberikan daripada yang fokuskan pada konteks internasional. Secara tradisional para Analis telah menekankan bahwa sifat sistem internasional dan hubungan antara negara dengan kondisi-kondisi dalam sistem itu menentukan bagaimana negara itu akan berperilaku.

Penulis menggambarkan aplikasi teori William D.Coplin tersebut sebagai berikut:

## Aplikasi Teori

Table II



Dari gambaran aplikasi tersebut, dalam Konteks Internasional adanya persiteganggan antara Turki dan Suriah berlangsung kurang lebih 7 Tahun dihitung setelah terjadinya pemberontakan terhadap Bashar Al Assad pada tahun 2011. kawasan Timur Tengah memang rawan konflik baik antar negara maupun konflik yang terjadi dalam satu negara. Konflik yang terjadi di Suriah tentang keinginan rakyat Suriah untuk melakukan revolusi terhadap rezim Bashar Al assad menjadi sorotan dalam dunia internasional, dimana dalam penanganan perang sipil antara pemerintah dan rakyatnya diduga kuat melakukan pelanggaran HAM dan penggunaan senjata Kimia yang ditentang oleh Dunia Internasional, terlebih banyaknya korban berjatuhuan dari masyarakat sipil dan menyebabkan ribuan masyarakat sipil tewas.

Melihat situasi tersebut Turki tidak tinggal diam untuk mencegah terjatuhnya korban yang lebih banyak dan dampak konflik tersebut bagi negaranya. Melihat situasi yang tidak stabil di Suriah, dimana adanya para pemberontak Islam garis keras dan Rakyat Suriah yang menginginkan Revolusi. Pembuatan Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Turki Presiden Recep Tayyip Erdogan yang merasa politik dan

keamanan dalam negeri Turki terancam dengan kehadiran pengungsi dari Suriah yang dicurigai terindikasi paham radikal dapat mengancam keamanan nasional dan terjadinya pengaruh stabilitas ekonomi di Turki pasca menerima pengungsi dari Suriah,

#### **D. Hipotesa**

Bedasarkan latar belakang masalah maka penulis menarik hipotesa Apa pertimbangan Turki dalam perancangan zona aman di wilayah Suriah Utara:

1. Pertimbangan Politik dalam negeri Turki yang mendapat tekanan dari rakyat kepada pemerintah untuk segera bertindak terhadap situasi yang terjadi di Suriah dimana masalah kemanusiaan dan konflik yang berkepanjangan yang di Suriah dapat mempengaruhi situasi dalam negeri
2. Pertimbangan stabilitas ekonomi dan keamanan nasional negaranya dengan melibatkan kapabilitas militer di daerah perbatasan untuk memantau alur masuk pengungsian demi menjamin stabilitas negara dan Turki ingin menurunkan tensi militer yang terjadi di beberapa wilayah Suriah utara agar sebagian para pengungsi yang menetap di Turki dapat kembali ke negaranya.
3. Pertimbangan konteks Internasional hak asasi manusia masyarakat sipil Suriah yang menjadi korban perang dan mengangkat isu tersebut ke dunia internasional untuk mendapatkan perhatian dunia internasional.

#### **E. Jangkauan Penelitian**

Penelitian dengan judul “Pertimbangan Turki dalam perencanaan zona aman di wilayah Suriah Utara” akan dimulai pada tahun 2014 dimana pada tahun tersebut Turki bergabung dengan Amerika Serikat untuk membentuk zona aman di beberapa wilayah di Suriah Utara dengan tujuan untuk menghentikan serangan militer dari suku Kurdis yang ingin

mendirikan negara baru di Turki bagian tenggara, selain itu Turki juga melindungi negaranya dari ISIS yang sudah mulai masuk ke Aleppo pada awal tahun 2014. Kemudian penelitian ini akan berakhir pada tahun 2019 dimana masalah yang terjadi semakin banyak dan membesar seperti YPG yang menguasai sebagian wilayah di perbatasan Turki yaitu Tal Abyad, Ras al-Ain dan berbagai wilayah di Suriah Utara lainnya.

## **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan dan kegunaan akademis yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah melakukan identifikasi dan mengetahui bagaimana Alasan dan faktor-faktor keterlibatan Turki dalam konflik Suriah, selain itu untuk memperkaya kajian ilmu Hubungan Internasional dalam mata kuliah Hubungan Internasional di Timur Tengah dan yang terakhir dari tujuan penelitian ini adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar S1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **G. Metode Penulisan**

Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan Teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan data-data sekunder yang pengumpulan datanya dari buku-buku, jurnal, artikel, media cetak, media elektronik, dan website yang telah diolah menjadi data untuk diklasifikasikan yang kemudian disusun, diringkas, dianalisa dan disimpulkan sesuai permasalahan skripsi yang diteliti.

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan penelitian ini menjadi sebuah karya tulis, penulis membagi dalam beberapa bab dimana diantara bab-bab tersebut saling berkaitan sehingga menjadi satu kesatuan utuh.

**Bab I** menjelaskan mengenai pendahuluan yang terdiri dari, Latar Belakang Masalah, Rumusan masalah, Landasan teoritik,

Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, dan Daftar Pustaka.

**Bab II** menjelaskan tentang Hubungan Turki-Suriah, serta Turki-Amerika Serikat dalam perancangan zona aman, dan masalah antara Turki dan organisasi militer Kurdi.

**Bab III** menjelaskan konsep dari perancangan zona aman di wilayah Suriah Utara dari tahun 2013-2019 dan ancaman yang terjadi dalam perancangan tersebut

**Bab IV** menjelaskan tentang politik dalam negeri Turki terhadap situasi di Suriah, dampak ekonomi dan stabilitas militer, kepentingan dan pertimbangan Turki dalam perencanaan zona aman di wilayah Suriah Utara. Pertama, akan digunakan teori kebijakan politik luar negeri untuk menganalisis kepentingan Turki dalam perencanaan zona aman di wilayah Suriah Utara. Kedua, akan menggunakan teori kepentingan nasional untuk memperkuat analisis dengan menjelaskan faktor internal dan eksternal yang mendorong Turki ikut serta dalam perencanaan zona Aman di wilayah Suriah Utara.

**Bab V** berisi Kesimpulan dan Penutup, berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian dan analisis serta kata penutup yang dapat ditarik dari Pembahasan-pembahasan dari bab-bab sebelumnya.